

THE ROLE OF BALAI KERAPATAN TINGGI IN THE KINGDOM SIK YEARS 1889-1908

Lasmi Purnama Sari*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si**, Drs. Kamaruddin, M.Si***
Email: lasmipoernama@gmail.com, Isjoni@yahoo.com, kamaruddin@gmail.com
Cp: 082172321106

*History Education Studies Program
Education Department of Social Sciences
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract: *Balai Kerapatan Tinggi named Balai Rung Seri is building that was built during the reign of Sultan royal Siak. Balai Kerapatan Tinggi is a building that was built during the reign of Sultan Siak kingdom. Balai Kerapatan Tinggi used for deliberation and the judiciary in resolving the existing problems in the Kingdom Siak. This is evident during the Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, Balai Kerapatan Tinggi very important role in regulating government. As for the purpose of this study was to determine the background of the establishment of the Balai Kerapatan Tinggi at the time of the Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, to know the purpose of the establishment of centers, to know the role of the Balai Kerapatan Tinggi at the time of the Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, to know the officer or the person great royal Balai Kerapatan Tinggi Siak play roles in the future Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. The method used in this study is the historical method and qualitative method. Where the data were collected through interviews, documentation, and literature. Data was analyzed using qualitative way. As for the location of research that Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau. When research started from the seminar proposal to the thesis examination. The result shows that the Balai Kerapatan Tinggi was first built during Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. These centers play an important role in the Kingdom Siak, which is used to place the trial, the coronation of the king and ceremonies led by the royal Sultan Siak. To run the government assisted the great Sultan royal Siak.*

Key Words: *Balai Kerapatan Tinggi, Royal, Siak*

PERANAN BALAI KERAPATAN TINGGI PADA MASA KERAJAAN SIAK TAHUN 1889-1908

Lasmi Purnama Sari*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si**, Drs. Kamaruddin, M.Si***
Email: lasmipoernama@gmail.com, Isjoni@yahoo.com, kamaruddin@gmail.com
Cp: 082172321106

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Balai Kerapatan Tinggi yang diberi nama Balai Rung Seri adalah Gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Kerajaan Siak. Balai Kerapatan Tinggi digunakan untuk tempat bermusyawarah dan tempat peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada masa Kerajaan Siak. Hal ini terbukti pada masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, Balai Kerapatan Tinggi sangat berperan penting dalam mengatur pemerintahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang didirikannya Balai Kerapatan Tinggi pada masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, untuk mengetahui tujuan didirikannya Balai Kerapatan Tinggi, untuk mengetahui peranan Balai Kerapatan Tinggi pada masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, untuk mengetahui undang-undang atau aturan tertulis dalam Kesultanan Siak pada masa Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, untuk mengetahui pejabat atau orang-orang besar Kerajaan Siak yang berperan di dalam Balai Kerapatan Tinggi pada masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dan metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Adapun lokasi penelitiannya yaitu Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau. Waktu penelitian dimulai dari seminar proposal sampai dengan ujian skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Kerapatan Tinggi pertama kali dibangun pada masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Balai Kerapatan Tinggi ini berperan penting pada masa Kerajaan Siak, yaitu dipergunakan untuk tempat persidangan, penobatan raja, dan upacara adat yang dipimpin oleh Sultan Kerajaan Siak. Untuk menjalankan roda pemerintahannya Sultan dibantu oleh orang-orang besar kerajaan Siak.

Kata Kunci : *Balai Kerapatan Tinggi, Kerajaan, Siak*

PENDAHULUAN

Kerajaan Islam yang ada di Riau yang disebut-sebut dalam berita Tome Pires (1512-1515) ialah Siak, Kampar, Indragiri kini berada di daerah Riau. Mengingat kerajaan-kerajaan Kampar, Indragiri dan Siak pada abad ke 13 dan 14 Masehi masih ada dalam kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari-Majapahit, yang mendekati kepastian kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam sejak abad ke 15 Masehi. Pengaruh Islam sampai ke daerah Riau ini akibat perkembangan Kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka.¹

Kerajaan yang sangat besar pengaruhnya yaitu Kerajaan Siak terletak di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau yang tumbuh dan berkembang di Indonesia semenjak tahun 1723 sebelum dan sesudah masuknya kolonial Belanda dan Inggris sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Untuk pembangunan Negeri Siak yang lebih baik. Bangunan yang dimiliki Kerajaan Siak yang paling penting pada masa Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yaitu istana Siak diberi nama Assyerayah Hasyimiyah. Istana Assyerayah Hasyimiyah digunakan untuk tempat rumah kediaman, penerimaan tamu-tamu dan tempat pusat pemerintahan Kerajaan Siak. Selain dari Istana Assyerayah Hasyimiyah, bangunan yang dimiliki Kerajaan Siak adalah Balai Kerapatan Tinggi. Dengan didirikan gedung Balai Kerapatan Tinggi inilah sultan berharap Kota Siak akan menjadi kota yang rapi, bersih dan teratur tata pemerintahannya. Gedung inilah yang sangat berguna pada masa Kerajaan Siak dan sangat berperan penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di wilayah kekuasaan Kerajaan Siak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode historis, secara umum dapat dimengerti bahwa penelitian historis merupakan penelaah dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.²

Kegiatan historis adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menginterpretasikan masa lampau. Sebagai sumber data bagi penelitian historis adalah bahan-bahan rekaman yang dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: dokumen, rekaman kualitatif, dan peninggalan-peninggalan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, alat pengumpulan data instrument penelitian dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendiri.

¹Soedjono. R.P. Leirissa. K.Z. *Ibid*, Hal:37

²Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. PT Rineka Cipta, Hal. 332

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang didirikannya Balai Kerapatan Tinggi pada Masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin

Sultan Syarif Hasyim dikenal sebagai pemimpin yang baik budinya, bijaksana dalam pemerintahan Kerajaan Siak, dan dikenal sebagai orang yang berpengetahuan tinggi, hal ini membuat Belanda takut dengan pemerintahan negeri di wilayah Kerajaan Siak. Maka dari itu Belanda sering ikut campur dalam pemerintahan Kerajaan Siak supaya pemerintahan Kerajaan Siak bisa bekerja sama dengan Belanda dengan harapan negeri Siak juga dapat dikuasainya. Tetapi karena Sultan Syarif Hasyim ini berpengetahuan luas dan bijaksana dalam melaksanakan pemerintahannya, maka Kerajaan Siak ini semakin berkembang dibawah kekuasaannya, hal inilah yang berhasil membawa kebesaran dan kesejahteraan kerajaannya. Selain dari itu sultan ini yang berhasil membangun Negeri Siak, beliau menata Kota Siak secara rapi, dan membuat Siak menjadi lebih banyak perubahan.

Pada masa Sultan Syarif Hasyim memerintah di Kerajaan Siak, Sultan Syarif Hasyim menata suatu pemerintahannya. Untuk menata suatu pemerintahan, Sultan membangun suatu gedung atau balai dengan kata lain Balai Kerapatan Tinggi atau yang diberi nama "Balai Rung Seri". Balai Kerapatan Tinggi ini didirikan pada saat pemerintahan Kerajaan Siak yaitu sultan yang kesebelas atau yang dikenal dengan nama Sultan Syarif Hasyim. Pembangunan gedung Balai Kerapatan Tinggi ini berlangsung selama tiga tahun.

Arsitek dari Balai Kerapatan Tinggi ini adalah orang besar Kerajaan Siak yang bernama Tengku Sido. Tengku Sido ini adalah orang Siak dan salah satu orang besar Kerajaan Siak yang makamnya terletak di Sei Mempura. Pembangunannya dilakukan secara bergotong royong oleh penduduk yang mendiami wilayah Datuk Empat Suku yaitu, Datuk Suku Tanah Datar dengan gelar Seri Pekerma Raja, Datuk Suku Pesisir dengan gelar Seri Dewa Raja, Datuk Suku Lima Puluh dengan gelar Seri Bejuangsa, Datuk Suku Kampar dengan gelar Seri Amar Pahlawan. Adapun bangunan Balai Rung Seri menghadap ke Selatan atau menghadap ke sungai dengan bentuk anak tangga terbuka yang makin melebar kebawah. Bangunan ini menghadap ke sungai dikarenakan pada masa itu jalur transportasi melalui sungai, dengan kata lain pada masa itu tidak digunakan jalur darat, dikarenakan masih menggunakan jalan setapak yang tidak memungkinkan kendaraan darat untuk melewati jalan sempit tersebut. Untuk memudahkan Kapal berlabuh masa itu dibuatlah pelabuhan didepan gedung Balai Kerapatan Tinggi.

B. Tujuan Didirikan Balai Kerapatan Tinggi

Kerajaan Siak merupakan kerajaan Melayu yang terletak di Siak Sri Indrapura. Sebagai pendiri Kerajaan Siak ini adalah Raja Kecik. Kerajaan Siak semakin lama membuat daerah Siak menjadi semakin maju. Terlihat juga pada masa Sultan ke sebelas ini banyak terdapat perubahan yang terlihat dikawasan Kerajaan Siak. Disamping memajukan perekonomian rakyat, Sultan Syarif Hasyim banyak membangun suatu bangunan seperti istana peraduan Sultan Hasyim atau istana istri ke tiga Tengku

Embong, Balai Kerapatan Tinggi, dan Istana Asserayah Hasyimiyah. Dengan dibentuknya Balai Kerapatan Tinggi adalah salah satu tujuan Sultan untuk menjadikan Kerajaan Siak semakin maju dan karena kemajuan tersebut pihak Belanda pada masa itu semakin menekan beliau, karena dengan didirikan Balai Kerapatan Tinggi ini Kota Siak semakin terarah pemerintahannya dan menjadi ancaman untuk Belanda.

Balai Kerapatan Tinggi dibangun bertujuan untuk menata suatu pemerintahan Kerajaan Siak, kemudian Balai Kerapatan Tinggi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan mengatur segala peraturan hukum adat istiadat, peraturan yang berhubungan dengan orang-orang besar kerajaan, peraturan yang menyangkut kedamaian negerinya yang terbebas dari suatu permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dan membuat Negeri Siak menjadi aman dari kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi pada rakyat maupun dari Orang-orang Besar Kerajaan. Sehingga rakyat yang dibawah kekuasaan Siak ini menjadi patuh terhadap adat-istiadat dan mengikuti peraturan Raja selain dari itu juga hormat terhadap Raja.

C. Peranan Balai Kerapatan Tinggi Pada Masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin

Struktur pemerintahan Kesultanan Siak dapat dibagi kedalam empat periode, hal ini dikarenakan perubahan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perubahan situasi yang dihadapi, perubahan pandangan dikalangan pembesar istana dan semakin kuatnya pengaruh Belanda terhadap kehidupan kerajaan. Dalam masa periode 1723-1784 dari pemerintahan Kesultanan Siak terlihat bahwa tugas kepala pemerintahan dan pemimpin agama masih bersatu ditangan sultan dengan dibantu oleh Dewan Kesultanan. Karenanya tidak terlihat pemisahan antara tugas pemerintahan dan tugas keagamaan. Penanganan secara khusus adalah agama baru terlihat pada masa periode 1784-1898, yaitu dengan menunjuk Qhodi untuk menangani masalah agama beserta mengangkatnya sebagai salah seorang Dewan Kesultanan. Namun pada masa ini belum terlihat pemisahan antara badan eksekutif dan badan yudikatif. Dalam periode 1898-1915 baru dilakukan pemisahan antara badan eksekutif dan badan yudikatif. Akan tetapi pimpinan dari kedua badan tersebut masih tetap berada ditangan sultan. Hanya dalam masalah agama, pimpinannya diserahkan kepada Qodhi. Dalam periode ini, dengan hukum yang sudah mulai dikodifikasikan, tugas-tugas agama ditangani secara khusus. Sedangkan periode 1915-1945 periode pemerintahan Sultan Syarif Qasim II. Perubahan yang terjadi hanyalah berupa penyesuaian sehubungan dengan perubahan struktur pemerintahan.³

Pada periode kedua Sultan Syarif Hasyim sudah mulai memerintah Kerajaan Siak pada tahun 1889. Tetapi, beliau melakukan kodifikasi terhadap hukum yang berlaku pada periode ketiga 1898-1916. Sultan Syarif Hasyim juga mendirikan sebuah gedung untuk melakukan pengadilan yang berhubungan dengan sistem pemerintahannya. Gedung tersebut di beri nama Balai Kerapatan Tinggi.

Balai Kerapatan Tinggi pada masa Sultan Syarif Hasyim sangat berdampak positif bagi masyarakat didaerah kawasan Kerajaan Siak. Balai Kerapatan Tinggi dipergunakan sebagai mahkamah pengadilan tinggi Kesultanan Siak. Selain dari itu fungsi dari Balai Kerapatan Tinggi ini adalah tempat bermusyawarah kerajaan dan

³ Luthfi, Amir. 1983. *Unsur Islam Dalam Sistem Peradilan Kesultanan Siak Sri Indrapura 1915-1945*. Pekanbaru. Hal. 75

mufakat, sebagai tempat pelantikan atau penobatan dan pelaksanaan sidang-sidang adat, baik masalah pelanggaran adat maupun mahkamah syari'ah. peranan Balai Kerapatan Tinggi pada masa Kerajaan Siak pada masa Kerajaan Siak yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim tahun 1889 sampai dengan 1908 adalah sebagai berikut:

1. Tempat Persidangan

Pada masa Sultan Syarif Hasyim Balai Kerapatan Tinggi ini digunakan sebagai tempat persidangan perkara-perkara pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, baik itu dari hukum pidana maupun perdata. Perkara-perkara yang dipersidangkan di Balai Kerapatan Tinggi ini tidak hanya untuk Orang Besar Kerajaan melainkan rakyat biasa yang melanggar aturan seperti, pencurian, pembunuhan, masalah harta, penipuan, masalah tanah atau melanggar adat-istiadat lainnya, dan akan dimusyawarahkan di Balai Kerapatan Tinggi tersebut. Yang memimpin suatu persidangan adalah Sultan itu sendiri yang menjadi hakim tertinggi.

Pidana pada dasarnya diselesaikan oleh Kerapatan Tinggi, yaitu badan peradilan tertinggi. Pada badan peradilan tingkat terbawah, Hakim Kepala Suku atau Hinduk, hanya diberi wewenang menyelesaikan perkara-perkara pidana yang kecil dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 1 Ringgit. Dalam Bab al Qawaid tidak dijelaskan perkara apa saja yang dapat diselesaikan Hakim Kepala Suku atau Hinduk.

Pada Pengadilan Kerapatan Tinggi dijelaskan secara terperinci perbuatan pidana apa saja yang diperiksa dan diputuskan oleh Kerapatan Tinggi. Sebagaimana dikemukakan, ada enam jenis perkara pidana yang menjadi wewenang Kerapatan Tinggi, yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian atau perampokan, pembakaran, pendurhakaan, dan perbuatan angkara. Diluar enam jenis perkara itulah yang menjadi wewenang pengadilan Hakim Polisi atau Hakim Kepala Suku atau Hinduk.⁴

Dalam penyelesaian perkara perdata yang dijadikan pegangan adat dan syara'. Akan tetapi, unsur Syara' lebih dominan. Adat yang dipakai sebagai pertimbangan pada umumnya tidak bertentangan dengan Syara'. Bahkan, dalam masalah tirtah-pusaka dengan tegas disebutkan bahwa musyawarah dalam penyelesaian tirkah-pusaka adalah Qodhi Siak Sri Indrapura untuk Kerapatan Tinggi dan para Imam untuk pengadilan Hakim Polisi.

Dalam penyelesaian perkara perdata yang dijadikan pegangan adat dan syara'. Akan tetapi, unsur Syara' lebih dominan. Adat yang dipakai sebagai pertimbangan pada umumnya tidak bertentangan dengan Syara'. Bahkan, dalam masalah tirtah-pusaka dengan tegas disebutkan bahwa musyawarah dalam penyelesaian tirkah-pusaka adalah Qodhi Siak Sri Indrapura untuk Kerapatan Tinggi dan para Imam untuk pengadilan Hakim Polisi.

Dalam penyelesaian perkara perdata yang dijadikan pegangan adat dan syara'. Akan tetapi, unsur Syara' lebih dominan. Adat yang dipakai sebagai pertimbangan pada umumnya tidak bertentangan dengan Syara'. Bahkan, dalam masalah tirtah-pusaka dengan tegas disebutkan bahwa musyawarah dalam penyelesaian tirkah-pusaka adalah

⁴Luthfi, Amir. 1983. *Unsur Islam Dalam Sistem Peradilan Kesultanan Siak Sri Indrapura 1915-1945*. Pekanbaru. Hal. 51-52

Qodhi Siak Sri Indrapura untuk Kerapatan Tinggi dan para Imam untuk pengadilan Hakim Polisi.⁵

Proses persidangan yang menyangkut suatu perkara pada masyarakat pada saat itu dihadiri oleh orang-orang besar kerajaan atau pejabat-pejabat kerajaan yang berperan penting didalam Balai Kerapatan Tinggi.

Persidangan yang menyangkut rakyat biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan persidangan itu dilakukan di lantai dua Balai Kerapatan Tinggi dan tidak bisa disaksikan oleh rakyat-rakyat lainnya. Hanya saja rakyat lainnya menunggu di lantai bawah di dekat tangga turun untuk menunggu hasil persidangan tersebut, karena rakyat biasa tidak boleh masuk untuk mengadakan suatu persidangan terutama sidang yang berhubungan dengan kriminal.

Keunikan dari Balai Kerapatan Tinggi ini adalah mempunyai dua tangga untuk turun yang menentukan seseorang benar atau bersalah dalam melaksanakan persidangan perkara. Tangga sebelah kanan yang berwarna emas berbentuk melingkar adalah tempat turunnya seseorang yang dinyatakan tidak bersalah. Jika seseorang tidak bersalah pada persidangan maka diperintahkan untuk turun ditangga sebelah kanan yang berwarna emas terbuat dari besi berbentuk melingkar itu. Tangga sebelah kiri yang terbuat dari kayu adalah tempat turunnya seseorang yang dinyatakan bersalah. Dari situ bisa diketahui langsung oleh rakyat yang menunggu dibawah mana yang bersalah dan tidak bersalah dalam perkara yang dipersidangkan tersebut. Tindakan kepada orang yang bersalah setelah turun dari tangga sebelah kiri yang terbuat dari kayu tersebut langsung menuju ke penjara yang hanya mempunyai ventilasi untuk udara saja. Penjara pada saat itu terletak di sebelah kiri yang dilihat dari pintu belakang di samping gedung Balai Kerapatan Tinggi yang sekarang tidak ditemui jejak bekas penjara. Tempat berdirinya penjara dahulu, sekarang telah dijadikan Taman sehingga tidak banyak yang tahu tempat tersebut dahulunya adalah penjara pada masa Sultan Syarif Hasyim.

2. Penobatan Raja

Selain untuk tempat persidangan, Balai Kerapatan Tinggi ini digunakan untuk penobatan raja atau penobatan raja. Yang menghadiri penobatan raja sama halnya seperti dilakukannya persidangan atau musyawarah yang di hadiri oleh orang-orang besar kerajaan pada masa Kerajaan Siak, terutama Datuk Empat Suku.

Datuk Empat Suku yang menjadi peran penting didalam pemilihan raja. Gelar Sultan, diberikan oleh Datuk Empat Suku kepada sultan yang terpilih. Dan apabila sultan mangkat diberi gelar lagi dengan gelar Almarhum. Pergantian seorang raja itu apabila raja tersebut wafat, dan pada akhirnya digantikan oleh keturunannya.

Keturunan yang layak untuk menjadi raja adalah yang mempunyai syarat-syarat tertentu untuk menjadi raja. Pemilihan raja itu di nilai oleh dewan yaitu para Datuk-datuk Empat Suku, penilaian yang terlihat dari kebijaksanaannya, pengetahuannya, kepintarannya, tingkah laku, sopan santun, kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan segala hal yang menyangkut dengan kepemimpinannya. Datuk empat Suku sangat berperan penting dalam pemilihan raja karena Datuk Empat Suku yang terdiri dari Datuk Lima Puluh dengan gelar Seri Bejuangsa, Datuk Tanah Datar dengan gelar Seri

⁵ Luthfi, Amir. *Ibid*, Hal. 55

Pekerma Raja, Datuk Pesisir dengan gelar Seri Dewa Raja, Datuk Kampar dengan gelar Seri Amar Pahlawan, dan dihadiri oleh pejabat-pejabat lainnya.

3. Upacara Adat

Balai Kerapatan Tinggi tidak hanya untuk tempat persidangan, dan tempat penabalan sultan saja. Karena pada masa itu Upacara adat juga dilakukan di gedung Balai Kerapatan Tinggi ini.

Upacara adat yang dilakukan didalam gedung Balai Kerapatan Tinggi ini seperti upacara pelantikan Datuk-datuk Empat Suku dan pelantikan pejabat-pejabat kerajaan, upacara perayaan atau pesta setelah penabalan sultan, upacara kematian, upacara perkawinan sultan dan kerabatnya, upacara menjunjung duli, upacara persembahan hasil-hasil ladang, laut dan sebagainya. Upacara persembahan dari rakyat dan hukum menurut Hukum Islam. Selain dari itu, tamu-tamu besar seperti dari kerajaan luar lainnya melakukan upacara adat di gedung Balai Kerapatan tinggi.

Dalam perkawinan sultan yang diadakan di Balai Kerapatan Tinggi ini yang dihadiri oleh orang-orang besar kerajaan lainnya, orang-orang besar Kerajaan Siak, bahkan juga dihadiri oleh rakyat-rakyat biasa. Dapat disimpulkan bahwa perayaan seperti Perkawinan Sultan dan Kerabatnya terbuka untuk siapa saja yang menghadirinya.

D. Undang-undang atau Aturan Tertulis Dalam Kesultanan Siak Pada Masa Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin.

Sewaktu Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin atau Sultan ke XI, memerintah di Kesultanan Siak Sri Indrapura, beliau mendirikan percetakan untuk memenuhi kebutuhan kerajaan yang terkait administrasi pemerintahan kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini terjadi kodifikasi terhadap hukum yang berlaku. Kodifikasi tersebut termuat dalam sebuah buku bernama Bab al- Qawaid. Bab al- Qawaid yang artinya Pintu Segala Pegangan. Bab al-Qawaid berupa perubahan dan tambahan tentang peraturan pemerintah sebelum pemerintahan Sultan Syarif Hasyim.

Undang-undang atau peraturan yang mengatur segala persoalan kerajaan termuat didalam Bab al- Qawaid tersebut. Buku yang didasarkan atas kontrak politik dengan Belanda itu disahkan pada tanggal 1 Desember 1898 dan merupakan perubahan dan tambahan terhadap peraturan yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 1890 dan disahkan pada tanggal 27 April 1893. Hal ini dapat disimpulkan kekuasaan Belanda didalam Kesultanan Siak sudah besar. Pengaruh Belanda tercermin dalam struktur ketatanegaraan yang termuat didalam Bab al Qawaid.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Bab al Qawaid ditulis pada periode kedua yakni ketika Kerajaan Siak dipimpin oleh Sultan yang berketurunan Arab. Bab al-Qawaid ini semacam “konstitusi” dari Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah berbentuk Monarchi Konstitusional. Didalam Bab al Qawaid bahwa pemerintahan Kerajaan Siak dibantu oleh orang-orang besar kerajaan dan datuk-datuk yang diberi daerah kekuasaan disebut propinsi. Dan orang-orang besar kerajaan sebagai Dewan Kerajaan mendampingi sultan dan membuat undang-undang.

Dalam buku Bab al Qawaid peraturan yang menyangkut suatu hukum pidana dan perdata saja yang di atur dalam undang-undang, melainkan juga mengatur suatu ketertiban, tentang tugas Orang Besar Kerajaan, menyangkut suatu keamanan di Kerajaan Siak dan lain sebagainya.

E. Pejabat atau Orang-orang Besar yang Berperan di Balai Kerapatan Tinggi Pada Tahun 1889-1908

1. Stuktur Pemerintahan Pejabat atau Orang-orang Besar Kerajaan

Dalam Balai Kerapatan Tinggi ini mempunyai suatu pejabat atau orang-orang besar yang berperan didalam Balai Kerapatan Tinggi pada masa Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin atau Sultan Syarif Hasyim. Adapun struktur pemerintahan pejabat atau orang-orang besar kerajaan ialah :

1. Sultan,
2. Kerapatan Tinggi
Dalam Kerapatan Tinggi Sultan selaku Kertua dan dihadiri Controteur sebagai Penasehat.
3. Datuk Kesultanan
Dalam Datuk Kesultanan terdiri dari Datuk Empat Suku, Qodhi, Komisararis Negara Jajahan.
4. Hakim Polisi
Dalam Hakim Polisi terdiri dari Pengadilan Hakim Polisi dan Pengadilan Syari'ah.

2. Fungsi Lembaga Kerajaan atau Orang-orang Besar Kerajaan

Adapun fungsi dari masing-masing lembaga dalam kerajaan adalah sebagai berikut:

a. Sultan (Raja).

Sultan adalah kepala pemerintahan, pemegang kedaulatan dan administrasitertinggi dalam Kerajaan Siak. Seperti yang diketahui raja-raja Melayu pada umumnya mempunyai kuasa mutlak, baik dalam urusan pentadbiran negeri maupun membuat keputusan atau tindakan.

b. Dewan Menteri (Dewan Kerajaan)

Dalam melaksanakan pemerintahan, Sultan dibantu oleh Dewan Mentri atau Dewan Kerajaan. Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan pada awal terbentuknya ialah pada masa Sultan Kerajaan Siak yang pertama bernama Raja Kecil. Pengikut setia Raja Kecil didalam Kerajaan Siak diberi gelar oleh Raja Kecil yang dikenal dengan nama

Datuk Empat Suku. Dapat disimpulkan bahwa Datuk Empat Suku ini berasal dari pemberian Sultan Kerajaan Siak itu sendiri

Datuk Empat Suku ini sangat berperan penting terhadap jalannya suatu pemerintahan yang ada di Kerajaan Siak. Datuk-datuk atau Dewan Kerajaan Siak ini adalah sebagai pertimbangan, dan hasil dari pertimbangan disampaikan kepada sultan, sultan memutuskan suatu perkara tersebut. Dewan ini yang memilih dan mengangkat sultan. Dewan ini bersama sultan membuat undang-undang dan peraturan. Datuk Empat Suku ini juga berperan sebagai Dewan Menteri dan penasihat sultan. Selain dari itu Datuk Empat Suku berperan sebagai Hakim Kerapatan Tinggi. Peran Khusus Datuk Empat Suku ini adalah Sebagai Kepala Suku, Sebagai Kepala Pemerintah. Adapun Datuk Empat Suku yang ada di Kerajaan Siak ini adalah:

a. Datuk Lima Puluh gelar Seri Bejuangsa

Datuk Lima Puluh ini yang paling dituakan. Adapun yang menjadi Datuk Lima Puluh yang pertama adalah Datuk Bebas, beliau bersama-sama Raja Kecik dari Pagaruyung.

b. Datuk Tanah Datar gelar Seri Pekerma Raja

Semasa Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin menjadi Sultan Siak yang menjadi Datuk Tanah Datar adalah Datuk Mohd Thohir.

c. Datuk Pesisir gelar Seri Dewa Raja

d. Datuk Kampar gelar Seri Amar Pahlawan

Dimasa Sultan Syarif Hasyim memerintah di kesultanan Siak yang memegang jabatan Datuk Kampar adalah Datuk Haji Musfak. Didalam sejarah Kesultanan Siak Datuk Kampar pertama kalinya diangkat setelah Sultan Abdul jalil Rahmad Syah (Raja Kecik) menjadi Sultan di Siak (Buantan) sedangkan Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Lima Puluh sudah ada sejak Raja Kecik menyerang Johor.

Disamping Datuk Empat Suku ada pula Datuk Bintara Kanan dan Datuk Bintara Kiri Serta Datuk Bendahara dan para panglima kerajaan. Datuk Empat Suku baik itu masalah hukum pidana ataupun perdata dan masalah adat-istiadat nya pada saat itu hadir dalam pelaksanaan persidangan dan penobatan Raja.

c. Hakim Kerapatan Tinggi

Untuk melaksanakan Pengadilan Umum, mempunyai badan pelaksana yang bernama Kerapatan Tinggi. Kerapatan Tinggi ini berfungsi menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terhadap hamba rakyat Kerajaan Siak. Ketua dari Hakim Kerapatan Tinggi adalah Sultan sendiri. Sedangkan anggotanya terdiri dari para Datuk-datuk Empat Suku, Khadi Negeri Siak Sri Indrapura dan Controleur Siak mewakili Gubernur Belanda sebagai pedamping setiap persidangan.

d. Hakim Polisi

Tingkat propinsi dibentuk pula Kerapatan Propinsi yang diketuai oleh Hakim Polisi setempat. Kerapatan ini disebut Pengadilan Hakim Polisi. Kepala pemerintahan ditingkat Propinsi, sebagai wakil Sultan, dari Propinsi diwilayah Kerajaan Siak yang terdiri dari 10 Propinsi dangan.

e. **Hakim Syari'ah**

Untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan agama dibentuk Kerapatan Syariah yang disebut Pengadilan Syariah yang diketuai oleh Imam setempat. Oleh karena di Kerajaan Siak mempunyai 10 Propinsi, maka setiap Provinsi ada seorang Hakim Syari'ah. Hakim Syari'ah yang berkedudukan di Siak Sri Indrapura bernama Qadhi. Sedangkan Hakim Syari'ah yang berkedudukan disembilan Propinsi lainnya dikawasan Kerajaan Siak digelar Imam Jajahan. Qhadi Negeri Siak bertugas menangani pengadilan tentang harta pusaka warisan dan masalah-masalah hukum adat dan agama. Dalam melaksanakan tugasnya Qhadi Negeri Siak dibantu oleh Imam Jajahan di Provinsi tempat kejadian kasus perkara.

f. **Hakim Kepala Suku**

Pemerintahan yang terendah menurut hirarki kekuasaan Kerajaan Siak adalah kepala Suku atau Hinduk, yang menurut istilah ketatanegaraan Siak disebut Hakim Kepala Suku atau Hinduk. Setiap Provinsi yang 10 itu terbagi beberapa suku atau Hinduik berjumlah 211 Suku atau Hinduk. Kepala Suku atau Hinduk mempunyai Suku dan Hinduk yang beragam dan bermacam-macam nama suku atau hinduknya pula. Tugas kepala Suku atau Hinduk adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, mengurus atau mengatur kehidupan masyarakat, baik beragama, budaya adat istiadat yang taat kepada kerajaan dan Sultan. Kepala Suku atau Hinduk tunduk kepada Hakim Polisi yang mewakili Sultan di Propinsinya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang peranan Balai Kerapatan Tinggi pada masa Kerajaan Siak tahun 1889-1908, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran guna melengkapi penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Balai Kerapatan Tinggi atau diberi nama Balai Rung Seri adalah bangunan yang didirikan pada masa pemerintahan sultan Kerajaan Siak yang kesebelas yaitu Sultan Assaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Syarif Hasyim.
2. Mendirikan Balai Kerapatan Tinggi ini bertujuan untuk menata suatu pemerintahan yang ada di negeri Siak pada masa Sultan Syarif Hasyim, untuk mensejahterakan rakyatnya dengan mengatur segala peraturan hukum-hukum adat istiadat, peraturan yang berhubungan untuk orang-orang besar kerajaan selain dari itu juga untuk rakyat biasa dan sebagai kantor pemerintahan Sultan.

3. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini terjadi kodifikasi terhadap hukum yang berlaku. Kodifikasi tersebut termuat dalam sebuah buku bernama Bab al- Qawaid. Bab al- Qawaid yang artinya Pintu Segala Pegangan. Bab al-Qawaid berupa perubahan dan tambahan tentang peraturan pemerintah sebelum pemerintahan Sultan Syarif Hasyim. Isi dari Bab al Qawaid ini tentang peraturan yang dibuat oleh sultan dan dibantu oleh Datuk Empat suku berisikan tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh rakyat biasa dan juga tentang struktur pemerintahan yang ada pada masa Sultan Syarif Hasyim.
4. Balai Kerapatan Tinggi berperan sebagai tempat persidangan yang menyangkut hukum pidana maupun perdata, sebagai penobatan raja, baik itu memberi gelar untuk raja dan memberi gelar untuk mangkatnya seorang raja. Selain dari itu untuk mengadakan suatu upacara adat.
5. Balai Kerapatan Tinggi mempunyai lembaga kerajaanyaitu, Sultan, Dewan Kerajaan, Hakim Kerapatan Tinggi, Hakim Polisi, Hakim Syari'ah, Hakim Kepala Suku. Masing-masing dari itu mempunyai tugas dan kewajibannya untuk membantu sultan membangun negeri yang ada di wilayah Kerajaan Siak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan saran agar menjadi sebuah masukan. Adapun saran yang akan penulis berikan yaitu:

1. Sebagai generasi muda perlu mengetahui suatu sejarah yang telah terjadi untuk menambah ilmu pengetahuan, selain dari itu supaya sejarah yang telah ada tidak hilang begitu saja dan bisa menjadi sebuah pedoman hidup yang dapat dicontoh dari masa Kerajaan Siak mementingkan suatu peradilan dan diharapkan pada masa sekarang ini juga mementingkan suatu peradilan dan menjunjung tinggi keadilan.
2. Sebagai para pendidik perlu memberikan suatu pelajaran tentang Sejarah Lokal , terutama tentang Balai Kerapatan Tinggi yang ada pada masa Kerajaan Siak, supaya tidak terlupakan begitu saja. Karena peserta didik yang saat ini tidak banyak mengetahui tentang peranan Balai Kerapatan Tinggi ini.
3. Pemerintahan Kabupaten Siak diharapkan untuk semakin memperkenalkan Balai Kerapatan Tinggi ini kepada masyarakat supaya lebih dikenal oleh masyarakat Siak dan masyarakat luartentang bagaimana peranan Balai Kerapatan Tinggi pada masa Kerajaan Siak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. PT Rineka Cipta
- Soedjono, R.P. Leirissa, K.Z. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta. Balai Pustaka
- Lutfi, Amir. 1983. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*. Susqa Press. Pekanbaru.